



Evaluasi Kebijakan Publik Pengentasan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Solok Selatan

Putra Warumansyah Purba^{1*}, Triyuni Soemartono², Harry Nenobais³

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: putra.obed@gmail.com

Submit: 1 Mei 2025, Diterima: 1 Juni 2025, Terbit: 30 Juni 2025

Abstrak

Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam mengentaskan status daerah tertinggal pada periode 2015–2019 sebagaimana ditetapkan dalam berbagai regulasi nasional, termasuk RPJMN dan Kepmendesa. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan enam kriteria analisis kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Bahan dan metode. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan daerah, serta kajian pustaka terhadap dokumen perencanaan dan regulasi terkait.

Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang diambil Pemerintah Kabupaten Solok Selatan secara umum berhasil mendorong peningkatan indikator-indikator utama daerah tertinggal, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, perekonomian masyarakat, karakteristik wilayah, hingga kemampuan keuangan daerah. Efektivitas dan efisiensi tercermin dari peningkatan capaian pembangunan serta ketepatan penyerapan anggaran, sementara pemerataan dan responsivitas tampak melalui konsistensi pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui mekanisme musrenbang. Di sisi lain, faktor penghambat utama berasal dari kondisi geografis yang rawan bencana, sedangkan faktor pendukung muncul dari sinergi antarlembaga dan koordinasi lintas-OPD.

Kesimpulan. Secara keseluruhan, kebijakan publik yang diterapkan dinilai tepat dalam mendorong Kabupaten Solok Selatan keluar dari kategori daerah tertinggal dan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Daerah Tertinggal, Evaluasi Kebijakan, Solok Selatan, Efektivitas Pembangunan

Abstract

***Study purpose.** This study aims to evaluate the implementation of public policies by the South Solok Regency Government to alleviate the status of underdeveloped regions during the 2015–2019 period, as stipulated in various national regulations, including the National Medium-Term Development Plan (RPJMN)*

and the Minister of Villages Decree. The evaluation was conducted using analysis criteria according to William N. Dunn: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy.

Materials and Methods. The research approach employed a qualitative descriptive method, with data collection techniques including documentation, in-depth interviews with regional policymakers, and a literature review of relevant planning documents and regulations.

Results. The research results indicate that the public policies adopted by the South Solok Regency Government have generally succeeded in driving improvements in key indicators of underdeveloped regions, including infrastructure, human resources, community economy, regional characteristics, and regional financial capacity. Effectiveness and efficiency are reflected in improved development achievements and accurate budget absorption, while equity and responsiveness are evident through the government's consistent involvement of the community in the planning process through the Musrenbang mechanism. On the other hand, the main inhibiting factor stems from the disaster-prone geographical conditions, while supporting factors arise from inter-institutional synergy and cross-regional coordination.

Conclusion. Overall, the implemented public policies are deemed appropriate in moving South Solok Regency out of the category of underdeveloped regions and can serve as a reference for other regions facing similar issues.

Keywords: Public Policy, Underdeveloped Regions, Policy Evaluation, South Solok, Development Effectiveness

DOI: <https://doi.org/10.52188/jendelaawaja.v6i3.1707>

©2025 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



Pendahuluan

Percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi bagian dari perwujudan Tujuan Nasional yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengentasan ketertinggalan di Indonesia melibatkan dinamika permasalahan yang kompleks mengingat heterogenitas karakteristik dan permasalahan yang tinggi, sehingga heterogenitas ini berpeluang menimbulkan fragmentasi pembangunan dalam lingkup yang lebih luas karena pengelolaan daerah oleh Pemerintah Daerah tidak diikuti dengan integrasi pembangunan antar wilayah. Kajian yang dilakukan oleh Hofman dan Kaiser (2004) menyebutkan bahwa pemberian kekuasaan yang besar pada Pemerintah Daerah berimplikasi pada pemimpin-pemimpin lokal yang berlaku seperti raja-raja kecil yang tidak akuntabel terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah-nya, serta sulit untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya dalam mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di wilayahnya.

Upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai bagian dari perwujudan Tujuan Nasional yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih dihadapkan pada berbagai tantangan, di mana masih terdapat kesenjangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal, sehingga perlu dilakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal secara khusus, terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menjelaskan bahwa Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan

daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria: (a) perekonomian masyarakat; (b) sumber daya manusia; (c) sarana-prasarana; (d) kemampuan keuangan daerah; (e) aksesibilitas; dan (f) karakteristik daerah serta dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu.

Upaya pengentasan daerah tertinggal difokuskan melalui intervensi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal dengan memperhatikan akar masalah yang menjadi penyebab utama ketertinggalan suatu daerah, peringkat ketertinggalan daerah, persebaran daerah tertinggal antarprovinsi, capaian kinerja pembangunan secara keseluruhan dan karakteristik daerah tertentu yang memerlukan keberpihakan secara simultan dan masif dari Pemerintah Pusat, Instansi Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, Instansi Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mengentaskan ketertinggalan di 62 daerah tertinggal 2020-2024, maka disusun Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) tahun 2020-2024. Menyongsong perencanaan jangka menengah periode 2025-2029, perlu dilihat kembali pencapaian pengentasan ketertinggalan dari periode-periode sebelumnya. Kriteria dan indikator daerah tertinggal, serta model intervensi yang saat ini dijadikan acuan dan dilaksanakan perlu mendapat perhatian, apakah masih relevan atau perlu mendapat pembaharuan. Selain itu level penetapan daerah tertinggal, kemungkinan terjadinya kesenjangan juga perlu dikaji guna mencapai status entas dari ketertinggalan

Kabupaten Solok Selatan pertama kali masuk ke kategori daerah tertinggal melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009 dimana dalam RPJMN tersebut tertulis 199 Daerah Tertinggal termasuk Kabupaten Solok Selatan. Pada RPJMN selanjutnya, Kabupaten Solok Selatan dinilai belum entas dari kategori Daerah Tertinggal, sehingga Kabupaten Solok Selatan kembali masuk ke kategori Daerah Tertinggal melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Kabupaten Solok Selatan pada akhirnya dikategorikan Daerah Tertinggal Entas melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kepmendesa) Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun 2015-2019.

Keberhasilan Kabupaten Solok Selatan menjadi Daerah Tertinggal Entas merupakan hasil dari evaluasi banyak indikator dan kriteria, sehingga bukanlah sesuatu yang mudah. Evaluasi terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dilakukan untuk menjelaskan seberapa jauh kebijakan yang dibuat dan implementasinya telah dapat mencapai tujuan. Hal ini bisa dijadikan pedoman dan contoh bagi Daerah Tertinggal lainnya dalam membuat Kebijakan Publik yang bisa mendorong Entas dari kategori Daerah Tertinggal.

Bahan dan Metode

Sampel

Peneliti akan turun ke lapangan mengumpulkan data dari para informan yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Solok Selatan, Kepala Dinas dan Kepala Bidang pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Solok Selatan, pengusaha/swasta, dan masyarakat Kabupaten Solok Selatan terkait Kebijakan Publik yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam pengentasan Daerah Tertinggal.

Organisasi penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun menurut Moleong (2006:6) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Azwar (2010:5), penelitian dengan pendekatan deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Demikian, Pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan keadaan yang ada pada obyek penelitian berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

Instrument

Penelitian ini dilaksanakan dengan penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari wawancara, catatan laporan dokumen, dan lain-lain, atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk pendeskripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut.

Teknik analisis data

Dalam penelitian ini (metode deskriptif analisis), peneliti akan menyelidiki atau menggambarkan keadaan yang berhubungan dengan penelitian, dan tentunya akan ditunjang dengan data yang penulis peroleh dari kepustakaan maupun dari data yang diperoleh dari lapangan. Setelah itu, menganalisis dan mengelaborasinya sehingga dapat dijelaskan dengan data empiris dan mudah dipahami.

Hasil Dan Pembahasan

Keberhasilan kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam upaya pengentasan Kabupaten Solok Selatan dari kategori Daerah Tertinggal dapat dilihat dengan mengukur sejauh mana pelaksanaan pencapaian tujuan kebijakan-kebijakan publik tersebut. Pengukuran pencapaian tujuan tersebut diuraikan dalam 5 (lima) indikator yaitu: efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu bentuk kriteria yang di dalamnya terdapat pencapaian suatu suatu hasil yang dicapai. Pengukuran efektivitas dapat dilihat dari tujuan yang telah ditetapkan dibandingkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

a. Infrastruktur

Dari kutipan wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Solok Selatan dapat peneliti simpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berhasil dengan efektif menggunakan anggaran dalam pemeliharaan jalan – jalan kabupaten di Kabupaten Solok Selatan.

b. Sumber Daya Manusia

Kebijakan-kebijakan publik yang menyangkut Sumber Daya Manusia disimpulkan juga efektif. Setiap perencanaan kebijakan publik yang akan diambil dan pelaksanaannya mampu meningkatkan indikator-indikator seperti Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, dan angka melek huruf.

2. Perekonomian Masyarakat

Dilihat dari perkembangan ekonomi makro Kabupaten Solok Selatan sampai tahun 2019 secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hal ini dikarenakan kebijakan – kebijakan publik yang dibuat dinilai efektivitas.

a. Karakteristik Wilayah

Kabupaten Solok Selatan yang merupakan kawasan rawan bencana alam perlu dibuatkan kebijakan – kebijakan publik yang efektif dalam mengantisipasinya dan menanggulangginya jika terjadi bencana alam.

b. Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam rencana penganggaran dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output), dampak hasil (outcome) dan efektif dalam pencapaian hasil dan keluaran, serta mempertimbangkan regulasi-regulasi terkait.

3. Efisiensi

Efisiensi merupakan seberapa banyak usaha yang dilakukan di dalam mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi berkaitan juga dengan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dapat tercapai sesuai hasil yang diinginkan.

a. Infrastruktur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Solok Selatan dapat diketahui bahwa kebijakan-kebijakan publik yang dibuat terkait infrastruktur untuk mengentaskan Kabupaten Solok Selatan dari Daerah Tertinggal dapat berjalan dengan baik dan diselesaikan tepat waktu sesuai dengan perencanaan-perencanaan.

b. Sumber Daya Manusia

Efisiensi dalam kriteria Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari kebijakan – kebijakan publik yang dibuat mampu langsung meningkatkan angka-angka pada kriteria Sumber Daya Manusia. Ini bisa dilihat dari Umur Harapan Hidup (UHH) yang setiap tahun meningkat.

c. Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat yang terdiri dari beberapa indikator juga berhasil meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan terlaksananya kebijakan-kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan perekonomian warga dengan efisien.

d. Karakteristik Wilayah

Penanganan masyarakat yang terdampak jika terjadi bencana alam selama ini sangat efisien. Penanganan dapat segera dilakukan karena kerjasama dan kecekatan dari BPBD Kabupaten Solok Selatan dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

e. Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam rencana penganggaran dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output), dampak hasil (outcome) dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran, serta mempertimbangkan regulasi-regulasi terkait.

4. Pemerataan

Pemerataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dapat terdistribusikan pelayanannya atas dasar kriteria kesamaan manfaat yang diberikan. Pemerataan kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh kebijakan publik yang hendak dilaksanakan.

a. Infrastruktur

Bappeda Kabupaten Solok Selatan dalam merencanakan perbaikan dan pemeliharaan hal-hal terkait indikator infrastruktur di atas memegang asas pemerataan tanpa memandang faktor-faktor di luar teknis. Perencanaan yang dibuat berdasarkan kajian-kajian data sehingga dihasilkan perencanaan yang berkualitas, menyeluruh, dan merata.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dengan beberapa kriteria - kriteria diperhatikan secara merata. Setiap kebijakan publik dibuat dengan memperhatikan asas pemerataan.

c. Perekonomian Masyarakat

Indikator-indikator pada kriteria Perekonomian Masyarakat juga diperhatikan secara merata. Pembangunan jalan, Pembangunan pasar, program-program yang mendukung pertanian dan peternakan direncanakan secara merata di semua Nagari di Kabupaten Solok Selatan.

d. Karakteristik Wilayah

Dikarenakan wilayah Kabupaten Solok Selatan memiliki karakteristik wilayah yang cenderung rawan bencana, maka oleh karena itu BPBD dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memetakan secara menyeluruh dan merata wilayah – wilayah yang berpotensi besar mengalami bencana tersebut.

e. Kemampuan Keuangan Daerah

Dalam penyusunan anggaran selain berorientasi pada prestasi kerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output), dampak hasil (outcome), juga berdasarkan pemerataan. Tidak ada Nagari/Jorong yang dianggap anak tiri. Semua masyarakat di setiap Nagari/Jorong mendapatkan perlakuan yang sama dan merata dalam intervensi penganggaran.

5. Kecukupan

Kecukupan merupakan suatu nilai dari seberapa jauhnya pencapaian dari sebuah hasil yang diinginkan. Dalam hal ini hasil yang diinginkan merupakan kesesuaian proses kegiatan pembangunan dengan kepuasan dan tingkat kebutuhan masyarakat.

a. Infrastruktur

Bappeda Kabupaten Solok Selatan dalam merencanakan perbaikan dan pemeliharaan hal-hal terkait indikator infrastruktur di atas mengukur target yang ingin dicapai di setiap tahunnya.

b. Sumber Daya Manusia

Kebijakan - kebijakan publik terkait Sumber Daya Manusia yang dibuat, dinilai cukup dan tidak kekurangan. Hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan publik tersebut berasal dari aspirasi masyarakat dan data pencapaian tahun sebelumnya.

c. Perekonomian Masyarakat

Kebijakan-kebijakan publik pada kriteria perekonomian masyarakat juga berdasarkan wawancara dengan masyarakat dinilai cukup. Hal ini terbukti dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, turunnya kemiskinan dan pengangguran.

d. Karakteristik Wilayah

Masyarakat yang dipindah dari lokasi rawan bencana dianggap cukup jumlah dalam artian. tidak memindahkan semua warga. Di tempat yang baru juga masyarakat tersebut diberi fasilitas yang cukup begitu juga dengan lahan pertanian sebagai pengganti di lokasi asal yang rawan bencana tersebut.

e. Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga dinilai cukup dalam mengalokasikan anggaran-anggaran setiap kebijakan publik. Hal ini sangat bermanfaat sehingga kebijakan-kebijakan publik tersebut bisa terlaksana dengan baik.

6. Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

a. Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan senantiasa dalam perencanaan suatu kebijakan publik mengikutsertakan masyarakat. Pengikutsertaan masyarakat dimulai dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), sampai ke tahap Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Hal ini diharapkan agar setiap kebijakan publik yang dibuat melihat kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan publik tersebut mampu menjawab persoalan yang ada di masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memiliki kepekaan/responsivitas yang tinggi terhadap indikator-indikator dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia.

c. Perekonomian Masyarakat

Indikator-indikator pada kriteria perekonomian masyarakat juga mendapat respon yang baik dan cepat dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Program-program yang mendukung meningkatnya perekonomian masyarakat kerap merupakan aspirasi dari masyarakat seperti contohnya perbaikan pasar.

d. Karakteristik Wilayah

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan merespon dengan baik hasil dari kajian-kajian yang memetakan wilayah – wilayah rawan bencana di Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengantisipasi dampak-dampak akibat dari bencana seperti melakukan penghijauan di hutan yang gundul serta memindahkan masyarakat dari daerah yang terpetakan rawan bencana ke daerah yang relative aman.

e. Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melakukan penganggaran dengan memperhatikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, sampai Musrenbangda.

7. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada hasil/tujuan dari suatu kebijakan publik yang dibuat benar-benar berguna, bernilai, dan bermanfaat bagi masyarakat dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan - tujuan kebijakan.

a. Infrastruktur

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa kebijakan - kebijakan publik terkait kriteria – kriteria infrastruktur dinyatakan tepat guna dan tepat sasaran.

b. Sumber Daya Manusia

Kebijakan - kebijakan publik terkait Sumber Daya Manusia dibuat tepat sasaran. Hal ini berdasarkan wawancara dengan masyarakat, Dimana masyarakat merasa kebijakan publik yang dibuat tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan masyarakat, contohnya pemenuhan gizi-gizi bayi tercukupi melalui posyandu.

c. Perekonomian Masyarakat

Perekonomian masyarakat dan menurunnya pengangguran serta kemiskinan juga dikarenakan kebijakan publik masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tepat.

d. Karakteristik Wilayah

Dikarenakan Karakteristik Wilayah Kabupaten Solok Selatan yang rawan bencana banjir, longsor, dan gempa bumi, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan membuat kebijakan-kebijakan publik yang dinilai tepat.

e. Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Solok Selatan, perencanaan penganggaran dan penyerapan Anggaran Kabupaten Solok Selatan didorong dengan punya keluaran (output) dan dampak hasil (outcome).

Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan publik di Kabupaten Solok Selatan tahun 2015–2019 dalam rangka pengentasan daerah tertinggal menunjukkan keberhasilan yang baik berdasarkan enam kriteria evaluasi kinerja menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Kebijakan pemerintah daerah terbukti efektif meningkatkan kualitas pada enam kriteria daerah tertinggal, misalnya perbaikan infrastruktur jalan; efisien dari sisi biaya dan waktu dalam pelaksanaannya; serta relatif merata meskipun masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan rasio tenaga medis dan paramedis di beberapa wilayah. Dari sisi kecukupan, kebijakan seperti penambahan BTS dinilai memadai dalam mengatasi persoalan komunikasi dan informasi, sedangkan responsivitas masyarakat terlihat dari apresiasi positif terhadap peningkatan fasilitas pendidikan yang berdampak pada naiknya AHLS dan ARLS. Selain itu, ketepatan kebijakan tercermin dari program-program yang sesuai kebutuhan masyarakat, seperti “1 house 1 cow” yang mampu meningkatkan perekonomian warga. Pelaksanaan kebijakan publik tersebut juga dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat, di mana pemerintah berupaya meminimalisasi hambatan melalui perencanaan yang komprehensif dan koordinasi antar-OPD, contohnya dorongan Bupati kepada OPD untuk berkoordinasi dengan instansi provinsi terkait perbaikan infrastruktur. Adapun faktor penghambat utama berasal dari kondisi alam yang berada di luar kendali manusia, seperti rawannya longsor akibat kontur daerah yang berbukit dan berada di lereng gunung.

Reference

- A.G. Subarsono. (2005). *Analisis kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- A.G. Subarsono. (2008). *Analisis kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- Agustinus Lejiu, Masjaya, & Irawan, B. (2014). Evaluasi kebijakan pembangunan transmigrasi di Kabupaten Mahakam Ulu. *Jurnal Administrative Reform*, 2(4).
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.

- Alastyaningsih, E., & Nenobais, H. (2022). Implementasi program kegiatan infrastruktur hasil musrembang di Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen. *Publika*, 8(1), 16–20.
- Arikunto, S. (1996). *Prosedur penelitian*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi penelitian suatu pendekatan proposal*. PT Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2003). *Analisis data penelitian kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2006). *Data penelitian kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Damanik, Y. T., & Marom, A. (2020). Evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pelatihan keterampilan... Universitas Diponegoro.
- Dunn, W. N. (1999). *Analisis kebijakan* (S. Wibawa et al., Trans.). Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. N. (2003a). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, I. (2009). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Gava Media.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. John Wiley.
- Harold D. Lasswell & Kaplan, A. (1970). *Power and society*. Yale University Press.
- Islamy, M. I. (2001). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.
- Kementerian Desa. (2019). *Kepmendesa Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan 2015–2019*.
- Lexy, J. M. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Malczewski, J. (1999). *GIS and multicriteria decision analysis*. John Wiley & Sons.
- Mardalis. (1999). *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*. Bumi Aksara.
- Maryono, M. (2014). *Evaluasi kebijakan bantuan sosial pertanian Kabupaten Nunukan 2008–2012*. Universitas Terbuka.
- Mustopadidjaya, A. (2002). *Manajemen proses kebijakan publik*. LAN.
- Mudjia, R. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Nawawi, H. (2005). *Penelitian terapan*. Gadjah Mada University Press.
- Nyoman Kutha, R. (2011). *Paradigma sosiologi sastra*. Pustaka Pelajar.
- Parsons, W. (2006). *Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan* (T. Wibowo, Trans.). Kencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010–2014.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004–2009.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015–2019.
- Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang STRANAS-PPDT 2020–2024.
- Purwanti, D. (2019). Efektivitas kebijakan PPDB zonasi. *Dinamika*, 5(4), 1–7.
- Putra, F. (2003). *Partai politik dan kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Riant, N. (2008). *Public policy: Dinamika, analisis, manajemen*. Elex Media Komputindo.
- Rianto, A. (2004). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Granit.
- Saifuddin, A. (2010). *Metode penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Santoso, R. A., & Sastropoetro. (1988). *Partisipasi, komunikasi, persuasi, dan disiplin dalam pembangunan nasional*. Alumni.
- Setyorini, T. (2013). Kebijakan Pemkab Bantul... *Jurnal PMI*, X(2).
- Soeprapto. (2000). *Evaluasi kebijakan*. Rineka Cipta.
- Solichin, A. W. (2008). *Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi*. Bumi Aksara.
- Sri Wahyuni. (2016). *Evaluasi kebijakan penyuluh pertanian Kabupaten Nunukan*. Universitas Terbuka.

- Suaedi. (2012). *Evaluasi kebijakan bantuan sarana prasarana rumput laut*. Universitas Terbuka.
- Suharno. (2010). *Dasar-dasar kebijakan publik*. UNY Press.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.
- Thoha, M. (2003). *Perilaku organisasi*. Rajawali.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005–2025.
- V. Wiratna, S. (2014). *Metode penelitian: Lengkap, praktis, mudah dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan publik: Proses dan analisis*. Intermedia.
- Winarno, B. (2004). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik*. PT Buku Kita.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi teori, model, standar, aplikasi, dan profesi*. Rajawali Pers.
- Yenchilia Tresna Damanik & Marom, A. (2020). Evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan... Universitas Diponegoro.
- Yusuf, A. M. (2013). *Metode penelitian kualitatif dan penelitian gabungan*. Rineka Cipta.

Information about the authors:

Putra Warumansyah Purba, ST: putrawarumansyah@kemendesa.go.id, Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta

Prof Dr. Ir. Triyuni Soemartono, MM: pps@moestopo.ac.id, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Indonesia

Dr. Harry Nenobais, M.Si: pps@moestopo.ac.id, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Indonesia

Cite this article as: Purba, Putra Warumansyah. Et al. (2025). Evaluasi Kebijakan Publik Pengentasan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Jembatan Efektivitas Ilmu Dan Akhlak Ahlussunah Wal Jama'ah*, 6(3). 555-565. doi